

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DALAM EKSEKUSI TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS



Oleh :

CHINDRA ADIANO

NIM : 1321700031

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DALAM EKSEKUSI TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Magister Hukum**



Oleh :

CHINDRA ADIANO

NIM : 1321700031

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

TESIS

KEWENANGAN KEJAKSAAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM EKSEKUSI TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan Oleh :

CHINDRA ADIANO

NIM : 1321700031

Telah disetujui Pembimbing untuk diajukan

Surabaya, 11 Januari 2020

Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
Pembimbing I



Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.
Pembimbing II



TESIS

KEWENANGAN KEJAKSAAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM EKSEKUSI TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan Oleh :

CHINDRA ADIANO

NIM : 1321700031

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan
Dinyatakan Lulus Pada Ujian Tesis Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 11 Januari 2020

TIM PENGUJI :

Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.
Ketua

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.
Sekretaris

Mengesahkan :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CHINDRA ADIANO
Fakultas : HUKUM
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Jenis Karya : TESIS

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya meyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, atas karya Tesis saya yang berjudul:

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DALAM EKSEKUSI TINDAK PIDANA KORUPSI**

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 17 Januari 2020

Yang Menyatakan



(CHINDRA ADIANO)

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : CHINDRA ADIANO

NIM : 1321700031

Program : Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa Tesis yang saya buat dengan judul :

KEWENANGAN KEJAKSAAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM EKSEKUSI TINDAK PIDANA KORUPSI

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan Duplikasi dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini serta disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam Naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Tesis ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 11 Januari 2020



TESIS

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DALAM EKSEKUSI TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan Oleh :

CHINDRA ADIANO

NIM : 1321700031

Telah disetujui Pembimbing untuk diujikan :

Surabaya, 11 Januari 2020

Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

Pembimbing I

Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.

Pembimbing I

TESIS

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DALAM EKSEKUSI TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan Oleh :

CHINDRA ADIANO

NIM : 1321700031

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji dan
Dinyatakan Lulus Pada Ujian Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

Pada Tanggal : 11 Januari 2020

Tim Penguji :

Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.

Ketua

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.

Sekretaris

Mengesahkan,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : CHINDRA ADIANO
NIM : 1321700031
Program : Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa Tesis yang saya buat dengan judul :

KEWENANGAN KEJAKSAAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM EKSEKUSI TINDAK PIDANA KORUPSI

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan Duplikasi dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini serta disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam Naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Tesis ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 11 Januari 2020
Hormat Saya,

Chindra Adiano

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas ridho serta kuasanya, saya dapat menyelesaikan penulisan Naskah Tesis yang berjudul “KEWENANGAN KEJAKSAAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM EKSEKUSI TINDAK PIDANA KORUPSI”.

Tesis ini merupakan syarat kelulusan, guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam penulisan tesis ini, saya telah banyak mendapat bimbingan serta bantuan, baik berupa moril maupun materiil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang juga dalam hal ini bertindak sebagai Pembimbing Tesis I, yang membantu dan membimbing dalam penulisan naskah tesis ini, serta selaku Dosen Penguji dalam Seminar Proposal Tesis dan juga Seminar Progress Tesis.
2. Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H. selaku Pembimbing Tesis II, yang membantu dan membimbing dalam penulisan tesis ini, serta selaku Dosen Penguji dalam Seminar Proposal Tesis dan juga Seminar Progress Tesis.
3. Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H. dan Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum. yang bertindak sebagai Penguji dalam Ujian Tesis
4. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama ini.
5. Istri tercinta saya yakni Ardini Octaviarini, yang senantiasa mendukung dan membantu dalam penulisan Naskah Tesis ini.
6. Kedua orang tua tercinta yakni Almarhum Bapak Wahyu Purnomo dan Ibu Ating Yuniati serta kakak penulis Achmad Nueski Meiringga, yang selalu ada mengisi hari-hari saya.
7. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Angkatan 39-A dan 41, yang telah mengisi hari-hari saya selama menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

8. Yang Terhormat Bapak Amos HZ Taka, S.H., M.H. selaku Pimpinan Kantor Hukum Amos HZ Taka & Associates, yang banyak membantu saya, serta selalu support dan memberikan izin setiap mengikuti bimbingan tesis.
9. Seluruh rekan-rekan Keluarga Besar Kantor Hukum Amos HZ Taka & Associates.
10. Rekan-rekan Pendidikan dan Pelatihan Auditor Hukum Jimly School of Law and Government angkatan Surabaya 1 tahun 2019, yang selalu memberikan dukungannya selama saya menyusun Naskah Tesis ini.
11. Semua pihak yang turut membantu dan memberi dukungan dalam pembuatan Naskah Tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam halaman ini.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan Naskah Tesis ini masih banyak kekurangan, sehingga dengan segala kerendahan hati saya masih mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari rekan rekan pembaca.

Surabaya, 11 Januari 2020

Chindra Adiano



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CHINDRA ADIANO
Fakultas : HUKUM
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Jenis Karya : TESIS

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya meyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, atas karya Tesis saya yang berjudul:

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DALAM EKSEKUSI TINDAK PIDANA KORUPSI**

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 17 Januari 2020

Yang Menyatakan

Materai
6000

(CHINDRA ADIANO)

RINGKASAN

Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemberantasan korupsi berupa kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan atas ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Ketentuan mengenai kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tersebut sekaligus memperkuat ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang mendasari kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi

Namun ternyata sejalan dengan tujuan dari Kejaksaan untuk memberantas korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi juga mengemban amanah Undang-Undang untuk memberantas tindak pidana korupsi, sebagaimana termuat dan diatur di dalam Pasal 6 dan Pasal 11 Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Sebagaimana penuntutan yang merupakan wewenang khas (*dominus litis*) kejaksaan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incraacht*) juga merupakan wewenang kejaksaan. Hal ini adalah justifikasi dan legitimasi bagi Kejaksaan untuk bertindak sebagai sebagai penuntut umum dan sebagai eksekutor yang melaksanakan putusan dan atau ketetapan pengadilan.

Secara normatif Pegawai KPK sebagai penuntut umum, tidak memiliki kewenangan eksekutorial atau melaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga eksekusi selama ini tidak sah dan akibatnya eksekusi batal demi hukum. Jaksa KPK memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan hak dalam kedudukan baru sebagaimana UU KPK. Penuntut umum KPK tidak bisa lagi disebut sebagai jaksa sebagaimana dimaksud dalam UU Kejaksaan, tetapi disebut sebagai pegawai KPK yang diberikan tugas dan wewenang selaku penuntut umum oleh undang-undang. Hal ini karena dalam KUHAP yang dinyatakan sebagai pelaksana putusan pengadilan adalah jaksa pada instansi Kejaksaan. Tugas Jaksa sebagai penuntut umum diatur dalam pasal 14 KUHAP dan dipertegas kembali dalam pasal 137 KUHAP. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya. Sehingga, KPK tidak mempunyai landasan hukum dan acuan yang jelas dalam melaksanakan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Incracht*)

ABSTRACT

The prosecutor's office has the duty and authority to eradicate corruption in the form of the authority to investigate criminal acts of corruption based on the provisions of Article 30 paragraph (1) letter of Law Number 16 Year 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, and at the same time strengthen the provisions of Article 284 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code which underlies the authority of the Prosecutor's Office in conducting an investigation of corruption.

In line with the objectives of the prosecutor's office to eradicate corruption in Indonesia, the Corruption Eradication Commission also carries out the mandate of the Law to eradicate corruption, as contained in and regulated in Article 6 and Article 11 of Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. As the prosecution is a typical authority (*dominus litis*) of the prosecutor's office, the implementation of court decisions that have permanent legal force (*incraaht*) are also the authority of the prosecutor's office. This is a justification and legitimacy for the Prosecutor's Office to act as a public prosecutor and as an executor who carries out the court's decision and or decision. Normatively, KPK employees as public prosecutors do not have executorial authority or implement court decisions that have permanent legal force, so that the execution so far is not legal and consequently the execution is null and void. The KPK prosecutor has duties, authorities, obligations and rights in a new position as per the KPK Law. The KPK's public prosecutor can no longer be called a prosecutor as referred to in the Prosecutor's Law, but is referred to as an KPK employee who is given the duties and authority as a public prosecutor by law. This is because in the Criminal Procedure Code which is declared as the executor of a court decision is a prosecutor at the Prosecutor's Office.

Based on the existing problems, a legal research can be applied using the normative legal research method, with the form of a legal study that aims to assess the implementation of a statutory regulation and carried out by conducting library research and field research, by evaluating comparisons based on norms and existing provisions.

So in the end, it can be seen that the authority directly related to the execution of court decisions by the KPK is not strictly regulated. Regulated in the Corruption Eradication Commission Law is limited to the authority of the

Corruption Eradication Commission in the investigation, investigation and prosecution of criminal acts. The principle of *dominus litis*, which confirms that there is no other institutions has the right to prosecute other than the Public Prosecutor who is absolute and monopolistic, because the Prosecutor's Office is the only institution that has and monopolizes the functions of the prosecution and settlement of criminal cases.

Keywords : Execution Authority, Prosecutor, Commission of Corruption Eradication

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR TIM PENGUJI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Orisinalitas Penelitian.....	12
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Jenis Penelitian.....	13
1.6.2 Pendekatan Masalah.....	13
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	13
1.6.3.1 Bahan Hukum Primer.....	13
1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	14
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.6.5 Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	14
1.6.5.1 Analisis Bahan Hukum.....	14
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP	17
2.1 Teori Negara Hukum.....	19
2.2 Teori Kepastian Hukum.....	21
2.3 Teori Keadilan.....	22
2.4 Teori Kewenangan.....	24
2.5 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	26
2.6 Konsep Eksekusi Putusan.....	29

BAB III PEMBAHASAN	41
3.1. Kewenangan Jaksa Dalam Menjalankan Eksekusi Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	41
3.1.1 Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif di Indonesia.....	41
3.1.2 Eksekusi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	45
3.1.3 Kewenangan jaksa dalam eksekusi putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi	51
3.1.4 Putusan 22/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG atas nama terdakwa Mochtar Mohamad.....	61
3.2. Eksistensi Asas <i>Dominus Litis</i> Dan Prinsip <i>Een En Ondeelbaar</i> Pada Perspektif Kepastian Hukum Jaksa KPK.....	63
3.2.1 Asas <i>Dominis Litis</i> dan Prinsip <i>Een en Ondeelbaar</i>	63
 BAB IV PENUTUP	 71
4.1 Kesimpulan.....	71
4.2 Saran.....	72
 DAFTAR BACAAN	 73